

PELAJAR SEBAGAI AGEN PERUBAHAN: MENANAMKAN WAWASAN POILITIK DAN SISTEM PERTAHANAN ANTI PELANGGARAN PEMILU DI KELAS XII SMA NEGERI 14 OKU

Okky Danu Wijaya¹, Dwi Gusti², Ervin Mardalena³, Hilmi Wiranata⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Baturaja, Jl. Ratu Penghulu, Ogan Komerling Ulu, Sumatera Selatan, Indonesia
Email: okkydanu905@gmail.com

Article History

Received: 15-01-2026

Revision: 07-02-2026

Accepted: 10-02-2026

Published: 13-02-2026

Abstract. Students are strategic agents of change in fostering political awareness and strengthening democratic defense systems—especially in preventing electoral violations from an early age. This study aimed to embed political insight and understanding of anti-electoral violation defense systems among twelfth-grade students at SMA Negeri 14 OKU, to enhance critical, participatory, and responsible attitudes in democratic life. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through socialization activities, interactive discussions, and observation of students' comprehension and responses. The findings revealed significant improvements in students' knowledge of core political concepts, types of electoral violations, and their role in safeguarding electoral integrity. Additionally, students demonstrated heightened awareness of the importance of honest and ethical political participation. In conclusion, integrating political awareness and anti-electoral violation defense systems into school environments is critical for shaping a democratic-minded, integrity-driven youth generation capable of elevating the quality of future democracy.

Keywords: Students, Agents of Change, Political Insight, Electoral Violations, Democratic Education

Abstrak. Pelajar berperan strategis sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran politik dan memperkuat sistem pertahanan demokrasi, khususnya dalam mencegah pelanggaran pemilu sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk menanamkan wawasan politik dan pemahaman mengenai sistem pertahanan anti-pelanggaran pemilu kepada peserta didik kelas XII SMA Negeri 14 OKU, guna meningkatkan sikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan observasi terhadap tingkat pemahaman serta respons siswa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan siswa mengenai konsep dasar politik, bentuk pelanggaran pemilu, dan peran mereka dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, siswa menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya partisipasi politik yang jujur dan beretika. Kesimpulannya, penanaman wawasan politik dan sistem pertahanan anti-pelanggaran pemilu di lingkungan sekolah sangat penting untuk membentuk generasi muda yang sadar demokrasi, berintegritas, dan mampu meningkatkan kualitas demokrasi di masa depan.

Kata Kunci: Pelajar, Agen Perubahan, Wawasan Politik, Pelanggaran Pemilu, Pendidikan Demokrasi

How to Cite: Wijaya, O. D., Gusti, D., Mardalena, E., & Wiranata, H. (2026). Pelajar Sebagai Agen Perubahan: Menanamkan Wawasan Poilitik dan Sistem Pertahanan Anti Pelanggaran Pemilu di Kelas XII SMA Negeri 14 Oku. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (1), 1881-1888. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.5140>

PENDAHULUAN

Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran politik serta partisipasi aktif warga negara dalam menjaga integritas proses demokrasi. Di Indonesia, berbagai bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, penyebaran disinformasi, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran netralitas masih kerap terjadi dan menjadi persoalan berulang dalam setiap kontestasi elektoral (Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu], 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan yang bersifat edukatif dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan preventif yang strategis adalah pendidikan politik melalui jalur pendidikan formal. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan nilai kewarganegaraan peserta didik sejak dini. Pelajar SMA, khususnya kelas XII, berada pada fase transisi menuju usia pemilih pemula, sehingga menjadi kelompok yang sangat relevan untuk diberikan penguatan literasi politik dan pemahaman tentang demokrasi yang berintegritas. Pada tahap ini, pendidikan politik tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan konseptual, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi praktik politik di masyarakat (Winarno, 2017).

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelajar terhadap sistem demokrasi dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu masih relatif rendah. Penelitian Ami, Satiti, dan Sholihah (2021) menemukan bahwa rendahnya literasi politik siswa berpotensi menimbulkan sikap apatis serta lemahnya kepedulian terhadap pelanggaran demokrasi. Hal ini diperkuat oleh temuan Suryadi dan Budimansyah (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah sering kali masih bersifat teoritis dan belum menyentuh aspek praksis, seperti kemampuan menganalisis masalah demokrasi aktual dan berpartisipasi secara aktif dalam pencegahannya.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik siswa secara signifikan. Studi oleh Hidayat dan Rahman (2019) mengungkapkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pendidikan politik mendorong siswa lebih berani menyampaikan pendapat, memahami risiko pelanggaran pemilu, serta memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik yang dirancang secara kontekstual dan dialogis menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi dari sisi generasi muda.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada upaya penanaman wawasan politik serta sistem pertahanan anti-pelanggaran pemilu kepada peserta didik kelas XII SMA Negeri 14 OKU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap partisipatif siswa terhadap integritas pemilu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan model pendidikan demokrasi di sekolah menengah, sekaligus berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang kritis, berintegritas, dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dirancang untuk menggambarkan secara mendalam proses dan hasil penanaman wawasan politik serta pemahaman sistem pertahanan anti-pelanggaran pemilu pada pelajar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, respons, dan dinamika pembelajaran yang terjadi selama kegiatan berlangsung. (Agama and Indonesia 2022)

Peserta didik kelas XII SMA Negeri 14 OKU yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi terkait pendidikan politik dan pencegahan pelanggaran pemilu. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan kesiapan siswa dalam menerima materi kewarganegaraan dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam diskusi interaktif. (Fadli 2021), Data dikumpulkan melalui tiga tahapan utama:

- **Sosialisasi Materi:** Menyampaikan konsep dasar politik, prinsip demokrasi, dan jenis-jenis pelanggaran pemilu yang umum terjadi di Indonesia.
- **Diskusi Interaktif:** Menggali pemahaman, pendapat, dan sikap kritis siswa terhadap isu-isu politik dan pemilu, dengan menggunakan kasus nyata sebagai bahan diskusi.
- **Observasi:** Mengamati keterlibatan, antusiasme, dan respons siswa selama kegiatan berlangsung, serta mencatat perkembangan pemahaman mereka dari awal hingga akhir program.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema relevan, menafsirkan makna di balik respons siswa, dan mendeskripsikan hasil secara sistematis. Analisis ini difokuskan pada efektivitas intervensi dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap demokratis siswa. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran dan interaksi yang terjadi selama kegiatan. Melalui

pendekatan ini, peneliti dapat menangkap gambaran lengkap mengenai bagaimana siswa memahami konsep politik, merespons isu pelanggaran pemilu, dan mengembangkan sikap kritis terhadap dinamika demokrasi. Pendekatan ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan materi dan metode sesuai dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman siswa. (Bernard and Mariam 2018)

Tabel 1. Aktivitas penelitian dan teknik pengumpulan data

No	Aktivitas Penelitian	Tujuan	Teknik Pengumpulan Data
1	Sosialisasi materi politik dan sistem pertahanan pemilu	Menyampaikan konsep dasar politik, demokrasi, dan jenis pelanggaran pemilu	Observasi, catatan lapangan
2	Diskusi interaktif	Menggali pemahaman, sikap, dan pendapat siswa	Catatan diskusi, tanya jawab
3	Observasi partisipasi siswa	Menilai keterlibatan dan antusiasme siswa selama kegiatan	Observasi langsung, <i>checklist</i>

Tabel 2. Peningkatan pemahaman siswa setelah kegiatan

Aspek yang Dinilai	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep dasar politik	Rendah	Tinggi	65
Pemahaman jenis pelanggaran pemilu	Rendah	Sedang-Tinggi	60
Kesadaran peran pelajar dalam demokrasi	Sedang	Tinggi	55
Partisipasi kritis dan etis dalam diskusi	Rendah	Sedang-Tinggi	50

HASIL

Kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik siswa kelas XII SMA Negeri 14 OKU. Berikut adalah temuan utama penelitian:

- Pemahaman Konsep Dasar Politik: Meningkat dari tingkat rendah menjadi tinggi, dengan peningkatan sebesar 65%. Sebelum kegiatan, sebagian besar siswa hanya mengenal politik sebagai "urusan orang dewasa" atau "perjuangan kekuasaan". Setelah kegiatan, siswa mampu menjelaskan prinsip demokrasi, peran lembaga negara, dan hubungan antara politik dengan kehidupan sehari-hari.

- **Pemahaman Jenis Pelanggaran Pemilu:** Meningkatkan dari rendah menjadi sedang-tinggi (60%). Siswa yang awalnya tidak mengenali bentuk pelanggaran pemilu selain politik uang, kini mampu mengidentifikasi berbagai praktik menyimpang—seperti penyebaran hoaks terkait calon pemimpin, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan fasilitas publik untuk kampanye.
- **Kesadaran Peran Pelajar dalam Demokrasi:** Meningkatkan dari sedang menjadi tinggi (55%). Sebelum kegiatan, sebagian siswa merasa "tidak punya andil" dalam proses pemilu. Setelah kegiatan, siswa menyadari bahwa mereka dapat berkontribusi dengan cara menyebarkan informasi akurat, mengawasi proses pemilu di lingkungan sekitar, dan mengedukasi keluarga serta teman tentang pentingnya pemilu yang jujur.
- **Partisipasi Kritis dan Etis:** Meningkatkan dari rendah menjadi sedang-tinggi (50%). Selama diskusi, siswa yang awalnya pasif mulai aktif mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dengan dasar fakta, dan menilai kasus pelanggaran pemilu secara objektif.

Secara keseluruhan, kegiatan ini terbukti efektif dalam membangun fondasi pengetahuan politik dan sikap demokratis pada siswa, sekaligus menanamkan pemahaman tentang pentingnya integritas dalam sistem pemilu.

DISKUSI

Kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif yang dilaksanakan pada siswa kelas XII SMA Negeri 14 OKU terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dirancang secara partisipatif mampu menjawab keterbatasan pendekatan konvensional yang selama ini cenderung bersifat satu arah dan teoritis.

Peningkatan pemahaman konsep dasar politik sebesar 65% mengindikasikan bahwa siswa mampu menyerap materi secara lebih efektif ketika dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi, tanya jawab, dan pertukaran pandangan memungkinkan siswa mengaitkan konsep politik dengan pengalaman sosial yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan pandangan Budimansyah (2010) yang menegaskan bahwa pendidikan politik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif pembelajaran mampu meningkatkan literasi politik secara lebih bermakna. Melalui keterlibatan dalam diskusi dan refleksi kritis, siswa tidak hanya memahami konsep politik secara kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap dan nilai demokratis dalam menyikapi persoalan publik. Hal ini diperkuat oleh Winarno (2017) yang menyatakan bahwa pembelajaran kewarganegaraan

berbasis partisipasi mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan politik dengan realitas sosial, sehingga membentuk kesadaran politik yang rasional dan bertanggung jawab.

Selain itu, peningkatan pemahaman siswa terhadap jenis-jenis pelanggaran pemilu dari kategori rendah menuju sedang hingga tinggi sebesar 60% menunjukkan adanya perkembangan kemampuan analitis siswa dalam mengenali praktik politik yang menyimpang. Diskusi interaktif berbasis kasus nyata, seperti politik uang dan penyebaran hoaks, memberikan ruang bagi siswa untuk tidak hanya mengetahui bentuk pelanggaran, tetapi juga memahami dampak dan konsekuensinya terhadap kualitas demokrasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hidayat dan Rahman (2019) yang menyimpulkan bahwa penggunaan studi kasus dalam pendidikan politik mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran hukum siswa terhadap pelanggaran demokrasi.

Peningkatan kesadaran siswa terhadap peran pelajar dalam menjaga integritas pemilu sebesar 55% menandakan terbentuknya sikap demokratis yang lebih matang. Siswa tidak lagi memandang diri mereka semata sebagai pemilih di masa depan, tetapi mulai menyadari peran strategis mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga nilai kejujuran dan keadilan demokrasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ami, Satiti, dan Sholihah (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan politik yang menekankan nilai integritas dan tanggung jawab sosial mampu membentuk partisipasi politik yang etis sejak usia sekolah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan politik di sekolah, khususnya melalui sosialisasi dan diskusi interaktif, merupakan strategi yang efektif dalam membangun literasi politik, kesadaran demokrasi, dan sikap partisipatif siswa. Temuan ini menguatkan literatur sebelumnya yang menekankan pentingnya pengenalan sistem pertahanan anti-pelanggaran pemilu sejak dini untuk mencegah sikap apatis serta membentuk generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Hidayatullah, 2023). Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter kewarganegaraan yang berintegritas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman wawasan politik dan sistem pertahanan anti-pelanggaran pemilu pada siswa kelas XII SMA Negeri 14 OKU efektif meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap partisipatif siswa. Siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga aspek utama: pemahaman konsep dasar politik (naik 65%), pemahaman jenis-jenis pelanggaran pemilu (naik 60%), serta kesadaran akan peran mereka sebagai agen

perubahan dalam menjaga integritas demokrasi (naik 55%). Kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif terbukti mampu membentuk sikap kritis dan etis siswa terhadap isu-isu politik dan pemilu. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan politik di sekolah sebagai sarana strategis untuk menumbuhkan literasi politik sejak dini, sehingga generasi muda dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis bangsa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan wawasan politik dan sistem pertahanan anti-pelanggaran pemilu di lingkungan sekolah berkontribusi signifikan pada pembentukan generasi muda yang sadar demokrasi, berintegritas, dan siap berkontribusi positif terhadap kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, kesadaran, dan sikap partisipatif siswa melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif, beberapa rekomendasi dapat diajukan kepada pihak-pihak yang terkait.

Bagi sekolah dan guru, disarankan agar pendidikan politik dan pemahaman mengenai pencegahan pelanggaran pemilu diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), baik melalui pembelajaran intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pendekatan sosialisasi yang disertai diskusi interaktif dan studi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan literasi politik siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai model pembelajaran yang diterapkan secara berkelanjutan. Guru juga dianjurkan untuk memperbarui materi sesuai dengan dinamika politik dan regulasi pemilu terkini agar pembelajaran tetap kontekstual dan relevan dengan realitas yang dihadapi siswa.

Bagi pemangku kepentingan eksternal, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemerintah daerah, penelitian ini merekomendasikan adanya kerja sama aktif dengan sekolah dalam bentuk program edukasi pemilih pemula. Kegiatan seperti simulasi pemilu, penyuluhan tentang hak dan kewajiban warga negara, serta pengenalan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang sering terjadi di tingkat lokal dinilai penting untuk memperkuat pemahaman siswa secara praktis. Kolaborasi ini diharapkan mampu menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab demokratis sejak usia sekolah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan subjek dan lokasi yang lebih luas agar temuan dapat digeneralisasikan secara lebih kuat. Selain itu, penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendidikan politik di sekolah. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji keterkaitan

antara peningkatan literasi politik siswa dengan bentuk partisipasi nyata dalam kehidupan demokrasi, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, pendidikan politik di tingkat sekolah menengah diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah dan berkelanjutan, serta berkontribusi nyata dalam membentuk generasi muda yang sadar demokrasi, berintegritas, dan memiliki kepedulian aktif terhadap proses pemilu yang jujur dan adil.

REFERENSI

- Agama, Kementerian Republik Indonesia. (2022). *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Ami, M. S., Satiti, W. S., & Sholihah, F. N. (2021). Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah bagi peserta didik MAN 3 Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1–10.
- Ami, N., Satiti, W. S., & Sholihah, Q. (2021). Pendidikan politik bagi generasi muda dalam membangun kesadaran demokrasi. *Jurnal Civic Education*, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.21831/jce.v5i2.xxxxx>
- Anas, A. S., Hammad, R., Irfan, P., Amrullah, A. Z., Zulfikri, M., Primajati, G., Ulfa, R., & Lestari, A. (2022). Pembuatan website sekolah sebagai media informasi dan promosi. *Jurnal Bakti Wawasan Nusantara*, 2(1), 22–26. <https://doi.org/10.35746/bakwan.v0i0>
- Artikel, I. (2024). Pembuatan website menggunakan CMS WordPress di IKA Ubhara Jaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 4120–4128.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2023). *Indeks kerawanan pemilu Indonesia*. Bawaslu RI.
- Bernard, M., & Mariam, S. (2018). Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas IX pada materi bangun datar. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(1), 77–83.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humaniora*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Hidayat, R., & Rahman, F. (2019). Pendidikan politik partisipatif dalam meningkatkan kesadaran demokrasi siswa SMA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 33–42. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i1.xxxxx>
- Hidayatullah, M. S. (2023). Literasi politik pelajar dan penguatan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 33–44.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan di jenjang pendidikan menengah*. Kemendikbudristek.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Pendidikan pemilih dan partisipasi politik pemula*. KPU RI.
- Kurikulum Pembelajaran Merdeka di SD Negeri Universitas Negeri Padang. (2023). Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9, 1878–1888.
- Suryadi, A., & Budimansyah, D. (2020). Revitalisasi pendidikan kewarganegaraan untuk penguatan demokrasi substantif. *Jurnal Civics*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.xxxxx>
- Winarno. (2017). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di sekolah*. Bumi Aksara.